

Tanggapan untuk IGN Putra dan AZ Abar:

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

Dominasi dan Resistansi

Ariel Heryanto

PARA ilmuwan sosial di berbagai negara belakangan ini menghadapi persimpangan jalan bila membicarakan makna, dan daya jangkau perlawanan kaum bawah, khususnya petani di daerah pedesaan, terhadap kekuasaan yang menghimpitnya. Persimpangan jalan itu bukan sekadar bersifat akademis, atau teoretis dan metodologis; tapi juga politis dan praktis. Mereka seakan-akan harus memilih salah satu dari dua kecenderungan.

Pertama, kecenderungan memberikan nilai tinggi bagi perlawanan kaum bawah. Perlawanan itu dikisahkan sebagai kepahlawanan kaum tertindas yang benar. Kemenangan bagi perjuangan mereka tidak dapat diraih secara drastis dalam waktu singkat, bahkan tidak dapat dipastikan. Tapi disimpulkan setidaknya-tidaknya bahwa kaum bawah tidak mudah diperdaya oleh kaum berkuasa. Mereka memanfaatkan setiap peluang untuk membangun dan merongrong kekuatan penguasa hingga ambruk.

Kedua, kecenderungan yang menekankan kuatnya kaum berkuasa dan betapa tak berdaya kaum rentan. Kaum berkuasa senantiasa menang dalam mempertahankan keadaan yang sedang mapan. Mereka tidak menginginkan perubahan, karena mereka diuntungkan oleh keadaan yang ada. Mereka mampu mempertahankan keadaan itu, karena mereka menguasai sumber-sumber daya dan pranata sosial untuk membujuk, menyogok atau memaksa orang banyak agar patuh atau membina-nasakan yang masih tetap membangkang.

Kedua pilihan itu tentunya bukan dikotomi mutlak. Alternatif lain atau jalan-tengah di antara dua model ekstrem itu bukan mustahil. Tapi, tak pernah mudah. Untuk jelasnya, kita perlu memahami sedikit lebih jauh pertentangan kedua pandangan itu.

Perdebatan klasik

Di kalangan ilmuwan berkecenderungan pertama, buku James Scott berjudul *Weapons of the Weak*, "Senjata Kaum Lemah", (1985) diakui sebagai salah satu puncak karya ilmiah dari aliran ini. Menurut Scott, perjuangan kaum lemah, seperti petani desa, harus dipelajari dalam bentuknya yang paling sederhana dan sehari-hari. Bukan dalam bentuk pemberontakan, gerilya apalagi revolusi, sebagaimana dianut para ilmuwan sosial sejak Perang Dunia II.

Jika petani tidak mengadakan pemberontakan bersenjata, bukan berarti mereka bodoh dan tidak tahu bahwa mereka ditindas dan diperas. Jika pegawai negeri di banyak negeri Dunia Kedua dan Ketiga mau memakai baju seragam kerja resmi yang ditentukan negara atau memasang foto pemimpin negara di kantor atau rumah, bukan berarti mereka tak bisa bikin lelucon jorok tentang para penguasa itu. Jika mereka ikut kampanye Pemilu, bukan berarti mereka fanatik pada partai.

Di kalangan cendekiawan kita sendiri, kajian tentang "budaya-tandingan" tahun 1980-an dapat digolongkan dalam kesibukan intelektual serupa. Perbincangan serius dan berkepanjangan tentang "plesetan bahasa" pernah mewarnai rubrik opini koran ini tahun lalu. Plesetan dipahami oleh banyak

pihak sebagai sebetulnya "perlawanan sehari-hari" seperti yang dijadikan pokok kajian utama James Scott di Malaysia.

Kecenderungan yang kedua pernah populer di kalangan sarjana Marxis, walau banyak sarjana non-Marxis yang mengadopsinya dengan alasan dan dari sudut pandang lain. Teori "hegemoni" yang dikembangkan Gramsci sewaktu dipenjara penguasa fasis Italia, merupakan salah satu puncak dari aliran pemikiran kedua ini. Daya tarik pandangan ini terletak dari upaya menjelaskan, mengapa banyak kaum tertindas justru bersikap seakan-akan mendukung kepentingan kaum penindasnya sendiri.

Contohnya. Di Afrika Selatan, banyak sekali tentara dan agen intel pemerintahan Apartheid yang terdiri dari orang kulit hitam. Dalam kebanyakan sejarah kolonialisme, kekuatan penjajah asing selalu (mungkin terutama) didukung oleh bangsa terjajah sendiri. Pada waktu Sumpah Pemuda diikrarkan di Hindia Belanda, 90% pegawai pemerintah penjajahan Belanda terdiri dari orang "Indonesia". Banyak wanita yang justru merendahkan dan memusuhi sesama kaumnya, termasuk memusuhi gagasan dan gerakan feminisme.

Di Indonesia sendiri dan di kalangan sarjana asing yang ahli tentang Indonesia, ada kecenderungan kuat untuk menekankan maha kuatnya negara Orde Baru dalam dinamika sosial (dalam negeri). Diskusi tentang demokrasi, keterbukaan, *civil society*, swastanisasi, pemben-

tukan kelas menengah, bermuara pada kesimpulan getir tentang kekuatan negara yang tak tertandingi kekuatan lain.

Untuk mudahnya, kecenderungan pertama dapat dikatakan sebagai aliran optimis. Kecenderungan kedua, lebih pesimis.

Bagi yang optimis, kajian kaum pesimis menyepelkan dan meremehkan kekuatan rakyat bawah. Lebih lanjut, ada tuduhan kaum pesimis ini berbuat demikian, karena mereka sebenarnya terdiri dari para intelektual elit yang tak kenal rakyat bawah dan potensi kekuatannya dari bawah itu. Tuduhan lanjutannya ialah, perubahan harus dipimpin atau datang dari kaum intelektual yang "sadar dan bijaksana".

Pihak pesimis tak kalah hebatnya menyerang kaum optimis. Menurut pihak pesimis ini, para penganut pemikiran optimis itu terlalu meromantisir kekuatan kelas yang tertindas. Romantisme ini sendiri dituduh bersumber dari elitisme kaum optimis. Di satu pihak, mereka tidak merasakan kehidupan rakyat kecil yang serba terbatas, dan di pihak lain mereka berkhayal tentang pahlawan di luar lingkungannya, karena kaum intelektual romantis itu sendiri tak berketuk menghadapi kekuasaan yang ada.

Seperti disebutkan di atas, kedua pilihan ini punya implikasi dan konsekuensi politis. Celakanya, implikasi politik keduanya memiliki cacat. Pada yang pertama (optimis) ada kecenderungan menerima dan melestarikan status-quo. Karena perlawanan kecil-kecilan dan

sehari-hari sudah dianggap ada dan dirayakan, ketimpangan yang lebih besar dan struktural terlalaikan. Pada yang kedua (pesimis) ada kecenderungan membantai setiap harapan dan semangat perlawanan. Akibatnya, pihak berkuasa diuntungkan karena dianggap tidak bisa dilawan.

Tentunya, yang diperlukan adalah sebuah wawasan alternatif.

Kasus UULLAJ

Di harian ini (3/8-92), IG Ngurah Putra dan A Zaini Abar pernah menyajikan sebuah analisa dan ramalan tentang "akhir" bagi kontroversi UULLAJ. Menurut mereka, kritik dan protes terhadap UULLAJ dapat dipastikan berakhir dengan kegagalan. Tak dijelaskan apa ukuran gagal atau berhasil dalam hal ini.

Seminggu kemudian, muncul keputusan yang mengejutkan dari Presiden tentang penundaan pelaksanaan UULLAJ. Saya yakin keputusan itu tak dipikirkan Putra dan Abar ketika meramalkan kegagalan kritik masyarakat. Tapi mereka tak beranjak dari ramalan semula. Mereka menulis lagi sebuah artikel (21/8-92) untuk memperbaharui pemikiran sebelumnya. Kali ini dengan ukuran (waktu) "kegagalan" yang lebih jelas, yang diulur lebih longgar. Negara pasti menang, kata mereka, walau kemenangan itu dapat saja tertunda. Sekali lagi tak dijelaskan, apakah ada ukuran yang "adil" dan "ilmiah" bagi batas waktu penundaan UULLAJ untuk menguji kemampuan teori dan kejituan ramalan mereka.

Jika ditempatkan dalam kerangka uraian di atas, pandangan

an Putra dan Abar dapat digolongkan sebagai pemikiran yang berkecenderungan kedua (pesimis). Pandangan mereka penting sebagai peringatan bagi siapa saja yang mengkhayalkan harapan muluk-muluk, dari kegiatan protes dan kritik terhadap Negara. Tapi pandangan mereka juga layak ditimbang secara kritis, karena bisa saja konservatif secara politik, dan keliru secara teoretik.

Watak konservatisme politik dari pandangan pesimis seperti itu, telah diuraikan di atas. Pandangan itu menindas setiap upaya dan semangat menggugat status-quo.

Secara teoretik, mereka mengandaikan determinisme strukturalisme. Hubungan negara dan masyarakat dipahami bersifat statis. Ini merupakan sindrom khas kaum strukturalis, dengan akibat khas ketidakmampuan menjelaskan (bahkan membayangkan) perubahan sosial secara historis. Dalam bangunan "struktural" tak ada peluang bagi perubahan, karena semuanya terjalin rapat.

Dalam tulisan pertama mereka, kegagalan "pasti" dari pihak masyarakat dijelaskan dalam kerangka "secara struktural": negara terlalu kuat dan masyarakat terlalu lemah. Usul mereka, ketimbang bikin banyak kritik dan protes sia-sia, lebih baik jika masyarakat "meningkatkan kekuatan politik-ekonomi."

Kontradiksi pandangan itu gampang jika "secara struktural" masyarakat tak mungkin berhasil protes soal yang relatif "sepele" seperti UULLAJ, bagaimana mungkin mereka berhasil (bahkan berpeluang mencoba) meningkatkan kekuatan politik-

ekonomi?

Kita tak perlu mengikuti utopia model optimis yang disajikan di atas, untuk mengkritik Putra dan Abar. Lebih dari itu, kita membutuhkan alternatif. Memang bukan di sini tempatnya, untuk menelaah alternatif demikian. Tapi, sebuah sketsa kasus dapat diajukan di sini.

Paling sedikit ada cacat yang sama pada kedua model pandangan yang umum itu. Keduanya menganggap hubungan kekuasaan antara kelompok kuat dan rentan bersifat tunggal dan instrumental, bukannya majemuk dan penuh muatan kontradiktif.

Bagaimana contohnya dalam praktek yang konkret? Mungkin tidak sepenuhnya salah, jika keberhasilan protes terhadap UULLAJ itu diukur oleh Putra dan Abar secara mutlak dengan terhapusnya sama sekali UULLAJ atau tidak. Tapi, ini hanya sebuah kemungkinan penilaian. Jelas salah jika makna politik dari peristiwa kontroversi UULLAJ dan hubungan kekuasaan di Indonesia direduksi hanya atau terutama sebatas formalisme legal begitu.

Sama kelirunya jika protes terhadap UULLAJ dianggap hanya dan terutama bertujuan menghapuskannya secara mutlak. Salah satu butir "keberhasilan" masyarakat dalam kasus itu ialah, kemampuan bersuara secara kolektif dan publik. Apa yang disuarakan, merupakan soal lain dalam kemajemukan soal-soal yang saling terkait dan sesekali bisa saling berkontradiksi.

***) Ariel Heryanto, staf pengajar UKSW, Salatiga**